

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *BLACK CAMPAIGN* PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR  
(Studi Putusan Nomor:16/Pid.Sus/ 2017/ PN.Tka.)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

**MUH. ARLIFIN**  
**NIM.10500113201**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh Arlifin

Nim : 10500113201

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 23 Agustus 1996

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No 9 Blok A, Btn Balindah  
Kab.Takalar

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada  
Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Putusan  
Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN. Takalar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 April 2018  
Penyusun,

Muh. Arlifin  
NIM : 10500113201

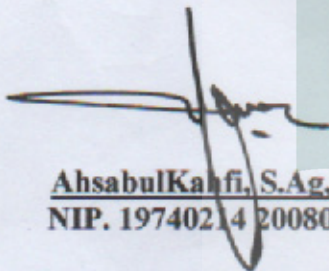
### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Muh.Arlifin** ,NIM: 10500113201, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA BLACK CAMPAIGN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 16 / Pid.Sus / 2017 / PN.Tka.)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

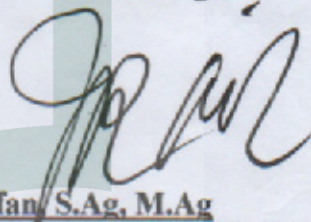
Makassar, Maret 2018

Pembimbing I



AhsabulKahfi, S.Ag, M.H  
NIP. 19740214 200801 1 009

Pembimbing II



Irfan, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19710518 200003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

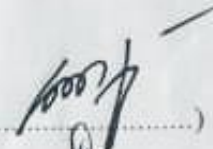

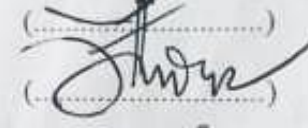





## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka)*”, yang disusun oleh saudara **Muh Arlifin**, NIM: **10500113201**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.


Samata, 15 Maret 2018  
27 Jumadil Akhirah 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....  )
Sekretaris	: Dr.H.M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....  )
Munaqasyah I	: Dr. Jumadi, S.H, M.H	(.....  )
Munaqasyah II	: Dr.Muh Sabri AR, M.Ag	(.....  )
Pembimbing I	: Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H	(.....  )
Pembimbing II	: Irfan, S.Ag, M.Ag	(.....  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN. Takalar) dapat di selesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan li al-'alaimin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun serta kelima saudara penulis yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Istiqamah S.H.,M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Ashabul Kahpi, S.Ag,M.H. dan Bapak Irfan, S.Ag,M.Ag. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jumadi SH.,MH dan Dr.Muh. Sabri Ar, M.Ag selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Takalar yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Buat Para senior saya di HmI yaitu Kakanda Asri Pandu, Kakanda Taqwa Bahar, Kakanda Peri herianto, Kakanda Rony Law dan Kakanda Zulkarnaim Bhona dll yang telah banyak memberikan arahan selama duduk dibangku perkuliahan.
10. Buat Kakanda Kurniadi Nur, Rahdian Rakaziwi, Abe Yanlua, Syarif, Laskar Tate dan Rais Rahman Cicero yang telah membimbing saya menjadi demonstren yang akhirnya bisa merasakan menjadi mahasiswa sejatinya mahasiswa.
11. Buat saudaraku yang M.Syaiful Haq, Aan Budi Hidayat, Firman Rusyaid, Muhaimin Malaba, Ical, karaeng jarix, Lakoja, amn nunu, anas ibra,

Dhiwanda, Bung Fajar, Jendral Chiwank, Habib Imam abu santoso, siti aisyah, windashiharly, adin fatonadin dan Ahmad Taufik. Kalian Takkan Terlupakan Kawan telah menjadi bagian cerita kehidupanku

12. Buat junior andalanku Ahmad zulfikar, Asman Kiwal, menotz, afri, safali, dimas, erlan, fauzi, satria dll yang belum sempat ku ucapkan satu persatu tapi banyak terima kasih karena menuruti arahan sang komando.
13. Buat saudara SMA ku yang menjadi teman bermainku sampai tua nanti Bung Arul, Iqbal Djalal, Ucup, Rahmat, Ryan Jentox, Mallo, Rusdi dll. Kalian adalah sahabat sejatiku.
14. Buat kakak-kakak ku yang tercinta Arlina, Arlisa, Arlitha, Arliman dan Arlindha saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kasihnya yang teramat dalam kepada adik bungsunya.
15. Buat nama terakhir A. Tenri Wali S.H yang sangat istimewa selama ini, saya sangat bersyukur telah mengenalmu dan telah menemaniku selama ini yang banyak memberikan saya motivasi agar cepat menyelesaikan Studi S1 Ilmu Hukum. Semoga ini menjadi langkah awal kita yang akan membuatmu tersenyum.
16. Terima kasih Juga buat keluarga Besar SIMPOSIUM yang menjadi tempat aku belajar banyak tentang hukum selain dibangku perkuliahan.
17. Keluarga besar HmI Cab. Gowa Raya Dan HmI Komisariat Syariah dan Hukum yang menjadi wadah Tempat aku mengenal Dunia Melalui Forum-Forum kajian dan Tempat yang memotivasiku untuk giat membaca.
18. Keluarga besar PERMAHI, UKM TAPAK SUCI, ILS dan ILE yang

menjadi wadah tempat berhimpunku.

19. Buat keluarga Besar Hiper mata Kom.Uin Alauddin saya juga banyak mengucapkan terima kasih atas selama ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Makassar, 13 Maret 2018  
Penyusun,

Muh.Arlifin





## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pilkada .....	
1. Pengertian Pemilu .....	10
2. Pengertian Kepala Daerah.....	11
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana .....	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pilkada .....	
1. Pengertian Tindak Pidana Pilkada .....	23
2. Landasan Hukum Tindak Pidana Ketentuan Larangan Pelaksanaan Kampanye.....	25
D. Tinjauan Umum Black Campaign .....	
1. Pengertian Kampanye Hitam .....	27
2. Bentuk-bentuk Kampanye Hitam.....	28
E. Tinjauan Umum Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan .....	
1. Batas Waktu Penyelesaian.....	31
2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Metode Pendekatan .....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	40
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	
A. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Black Campaign pada pemilihan Kepala Daerah dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka .....	41
B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .....	72
C. Analisis Penulis.....	74
 BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan .....	78
B. Implikasi Penelitian.....	79
 DAFTAR PUSTAKA .....	

## **ABSTRAK**

**Nama : Muh.Arlifin**  
**Nim : 10500113201**  
**Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/PN.Tka)”**

---

Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan hakim Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Black campaign pada pemilihan Kepala Daerah dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka dan 2) kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Takalar.

Hasil Penelitian: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana black campaign yang berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka telah sesuai karena telah berdasarkan Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan Pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. 2) Putusan hakim dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka yang dianalisis oleh penulis, tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP, hal ini dikarenakan putusan yang di jatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dianggap terlalu ringan karena dakwaan JPU yaitu menggunakan dakwaan kumulatif, yang jika dakwaan tersebut terbukti maka penjatuhan hukuman yang diberikan yaitu hukuman Maksimal ditambah dengan sepertiga, sedangkan dalam Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yaitu pidana penjara maksimumnya yaitu 18 (delapan belas) bulan.

Implikasi Penelitian: 1) Dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Kepala Daerah melalui sistem peradilan pidana, banyak kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana ternyata setelah melalui suatu proses akhirnya berguguran di tengah jalan dan hanya sebagian saja yang diperiksa di Pengadilan. 2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan setiap pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pemilihan Kepala Daerah, karena dalam kasus tersebut pasti mendapat sorotan yang lebih dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.



## **. BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Pilkada***

##### **1. Pengertian Pemilu**

Bagi Negara Demokrasi modern, Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Hasil pemilu menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.

Pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan secara berskala untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berskala.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan umum diartikan sebagai :

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik Negara. Melalui Pemilihan umum, rakyat

---

<sup>1</sup> Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar* (Refleksi, Makassar, 2012) Hal. 212



mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk dilembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Lebih lanjut rapat panitia Ad Hoc I dalam siding tahunan 200 yang membahas amandemen Pasal 18 UUD NRI 1945, menguraikan pemikiran yang melatarbelakangi dicantumkanannya frasa “dipilih secara demokratis”. Fraksi PPP dengan tegas menyebutkan arti penting dari Pilkada langsung, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang, hal ini sejalan dengan keinginan kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara langsung. Karena Presiden itu dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah pun Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih secara langsung oleh rakyat. dengan Undang- Undang nanti akan terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama media, Yogyakarta, 1999) h.221

Kemudian pemahaman tentang pemilihan Kepala Daerah juga dicantumkan dalam

UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015, mengatur bahwa :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pengertian Pilkada juga dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (7) Perbawaslu No. 2 Tahun

2015, mengatur bahwa :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah diperkenalkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui UU no.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sistem Pilkada dalam Undang-Undang tersebut ditengah perjalanannya dirasakan masih belum benar-benar demokratis karena yang boleh boleh mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanyalah partai politik atau gabungan partai politik, sementara calon perseorangan/ independent tidak dimungkinkan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ppu-v/2007 kemudian diberikan ruang atau peluang kepada calon pasangan perseorangan untuk maju didalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam UUD NRI 1945 BAB VIIB tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Namun demikian, pengaturan Pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya kaitan antara pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Selain itu secara materil, Pemilu langsung memang tidak berbeda dengan Pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.

Menurut Ramlan Surbakti bahwa secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya, Pemilukada merupakan Pemilu, dengan argumentasi <sup>3</sup>:

- a. Pengaturan tentang Pemilukada dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut disusun berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) mengenai asas Pemilu, dan hampir seluruhnya sama dengan pengaturan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketika pembuat undang-undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4), pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada ketentuan yang terkandung pada pasal-pasal lain dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, *Dalam titik Triwulan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.10.

Dilihat dari ciri-ciri yang disimpulkan bahwa Pilkada merupakan kegiatan Pemilu, hal ini berdasarkan <sup>4</sup>:

- a. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dari sudut asas yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, adalah asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Dilihat dari sisi penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2003.
- c. Dilihat dari sisi yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2004 bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, juga merupakan pemilih dari Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2003. Berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah dipilih oleh anggota DPRD.

---

<sup>4</sup> Petikan Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004, h.71

- d. Pembuat undang-undang menggunakan standar ganda dalam menerjemahkan Pasal 18 ayat(4), yang termasuk domain Pemerintah Daerah (Pasal 18) bukan hanya Kepala Daerah dan Wakil Daerah tetapi juga DPRD pembuat undang-undang melakukan penafsiran untuk Pasal 18 ayat (4).
- e. Tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

Makna pemilihan langsung itu sekurang-kurangnya merupakan jawaban yang efektif untuk sejumlah perkara yang melekat pada pemilihan dengan sistem perwaklian (*indirect democracy*), yaitu menekan kultur, mengurangi *money politic*, mengubah orientasi dari elitis menjadi populis, serta memperkaya basis rekrutmen para pemimpin. Hal ini terpokok juga adalah bahwa dengan memilih secara langsung Bupati dan Walikota, maka kedaulatan rakyat tidak lagi simbolik. Pilihan Kepala Daerah sebelumnya. yang terjadi adalah DPRD mengatasnamakan rakyat, pemegang kedaulatan rakyat di wilayahnya, tetapi semuanya itu hanyalah simbolik. Simbolik, dalam kenyataan hampir tidak ada hubungan antara DPRD dan rakyat yang mewakili itu semakin menjadi-jadi pada era sistem perwakilan. Padahal inilah era yang mestinya semakin memerlukan kebesaran elit partai untuk kian dekat di hati dan pikiran konstituennya.

Menurut Taufiqurrahman Syahuri<sup>5</sup> rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan Pemilukada di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana yang dimaksud Pasal 18B

---

<sup>5</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Anatomi Putusan MK RI Tentang Pemilukada*, Seminar Putusan MK Pengujian UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, h.6.



ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Menurut Suharizal<sup>6</sup> maksud dan tujuan pembentukan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak harus sama dan dapat juga dilaksanakan dengan pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap yang dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seperti tercantum dalam BAB VII B tentang Pemilihan Umum pada Pasal 22 E UUD NRI 1945.

Menurut I.B.G Suryatmaja M<sup>7</sup>, beberapa pertimbangan yang melandasi Pilkada secara langsung adalah :

- a. Sistem pemerintahan menurut UUD NRI 1945 memberikan keleluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
- b. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi.
- c. Dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, hubungan yang serasi antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>6</sup> Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.

<sup>7</sup> I.B.G Suryatmaja M, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* .(Jakarta: Artikel dalam Rountable Discussion, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, 2003), h.25.

Indonesia, maka kedudukan Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain dari pada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia juga dipakai istilah delik.

Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, dalam Bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di temukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>8</sup>

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Jakarta: CV Armico, 2008), h.1.

<sup>9</sup>Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193.

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan yang di timbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang di timbulkan olehnya".<sup>10</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Simons

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>10</sup>Modul tim, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008), h.14.

b. Menurut Van Hamel

Tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c. Menurut Kanter dan Sianturi

Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

d. Menurut Pompe

Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

e. Menurut E.Utrecht

Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen*-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>11</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila dalam waktu melakukan perbuatannya, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

---

<sup>11</sup>Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 21.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.<sup>12</sup>

Alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

- a. Jika si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan

---

<sup>12</sup>Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2007), h.72.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Askara Baru, 1999), h.80.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System* (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), h.48.



sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah.<sup>15</sup>

## 2 Unsur-unsur tindak pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>16</sup>

Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelaku dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

### a. Unsur subjektif

Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>17</sup> Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan).

Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum*, h.193.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 61.

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika, 2005), h. 7.

- 1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>18</sup>

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;

---

<sup>18</sup>Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 175.

b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pilkada**

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah Tindak Pidana Pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu<sup>20</sup>.

<sup>19</sup>Tim Modul, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Pusdiklat, 2008), h.38.

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1.

Pembentuk KUHP kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud Tindak Pidana Pemilu. Sintong Silaban<sup>21</sup> misalnya ketika memberi pengertian Tindak Pidana Pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan Pemilu.

Menurut Djoko Prakoso<sup>22</sup> menguraikan bahwa pengertian Tindak Pidana Pemilu dengan : “Setiap orang, badan hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.” Sedangkan menurut **Topo Santoso**<sup>23</sup> memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu, yakni : “Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terdapat juga istilah Tindak Pidana Pemilu dalam Pasal 29, 31, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 99, dan Pasal 102. Namun tidak ada satupun pasal yang memberikan definisi apa itu Tindak Pidana Pemilu. Berbeda dengan KUHP pelanggaran dalam KUHP menggunakan hukum acara singkat dan kejahatan dalam KUHP dengan hukum acara biasa.

---

<sup>21</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h.48.

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Cetakan I, Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h.148.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 5.

## **2. Landasan Hukum Tindak Pidana Ketentuan Larangan Pelaksanaan Kampanye**

Dasar hukum tindak pidana melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagai tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah pasal 187 ayat (2)

Undang-Undang No 8 Tahun 2015, yang mengatur bahwa :

Ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa :

Dalam kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik.
- c. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye.
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya, dan/atau
- k. Melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Unsur-Unsur Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Dengan sengaja

Bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca Indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana.

3. unsur melanggar ketentuan kampanye

unsur ini memiliki beberapa unsur alternatif perbuatan diantaranya “Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik. Atau Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”. Hal ini berarti sudah cukup hanya dengan salah satu unsur perbuatan saja yang terbukti maka seseorang telah memenuhi unsur dimaksud.

#### **D. Tinjauan Umum Black Campaign**

##### **1. Pengertian Kampanye Hitam (*Black Campaign*)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye diartikan gerakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik calon yang bersaing memperebutkan kedudukan parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemilihan umum atau pemungutan suara.<sup>24</sup>

Kampanye dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 angka 21 kampanye pemilihan yang disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Roger dan Story, kampanye ialah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>25</sup>

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Black Campaign* yang bermakna dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga

---

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 23.12 wit

<sup>25</sup> Venus, *Komunikasi Dalam Keoemimpinan*, (IndoPress, Bandung 2006) h.47



dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya, dan masyarakat umum.<sup>26</sup>

Defenisis kampanye hitam (*Black Campaign*) dikutip dari wikipedia umum adalah :

Suatu metode yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan presepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik, komunikasi ini agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam pada umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.<sup>27</sup>

Pengertian kampanye hitam diatas, penulis menyempitkan pengertian (*Black Campaign*) adalah menyebarkan informasi suatu calon yang berkenan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media massa maupun media sosial.

## 2. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam (Black Campaign)

Kampanye hitam tidak memiliki bentuk-bentuk secara khusus, melainkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kampanye hitam itu sendiri. Kemudian dari berbagai sumber perbuatan kampanye hitam merupakan perbuatan yang timbul

---

<sup>26</sup> Yanti Setianti, *Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak* (Alumni, Bandung, 2008) hlm 4

<sup>27</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye\\_politik](http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politik), diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 011 wit

pada masa kampanye berlangsung dengan berbagai kecurangan yang menyertai pelaksanaan kampanye tersebut. Perbuatan-Perbuatan yang terkandung dalam praktek kampanye hitam, di antaranya sebagai berikut :

a. Fitnah

Fitnah diserap dari bahasa arab, dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian.<sup>28</sup> Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang( seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).<sup>29</sup>

Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan anggapan negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat memengaruhi kehormatan, wibawa, dan reputasi seseorang.

b. pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu : secara lisan, pencemaran nama baik yang diucapkan, serta tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.

---

<sup>28</sup> Al Jami Ii Ahkam Al-Qur'an

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama, Indonesia, 2008) hal.152

Pencemaran nama baik yang khendak di lindungi adalah kewajiban setiap orang lain untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga disini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan perbuatan yang termaksud kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan dilakukan.<sup>30</sup>

#### c.penghinaan

Penghinaan termaksud ke dalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subjek hukum terhadap subjek hukumlainnya dengan cara yang subjektif, artinya dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seeseorang yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan deengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai subjektif dan objektif.

---

<sup>30</sup>Muzakkir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* ( Dictum, Jakarta ,2004 ) hal. 17

Jadi, kampanye pada dasarnya dianggap sebagai suatu ajang berlangsungnya proses komunikasi politik tertentu dengan cara memfitnah, melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kandidat peserta pemilu karena setiap peserta dan tim pemenangan berusaha meyakinkan para pemberi suara atau masyarakat agar tidak memberikan hak suaranya kepada lawan politiknya, bahwa kelompok atau golongannya adalah calon-calon yang paling layak untuk memenangkan kedudukan.

#### **E. Tinjauan Umum Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan**

Meski jenis pelanggaran bermacam-macam, tetapi tata cara penyelesaian yang diatur dalam UU hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU dan selisih hasil perolehan suara telah diatur dalam UU MK.

##### **1. Batas Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu**

Mekanisme Pelaporan Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam UU Pemilu BAB XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih,

pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu.<sup>31</sup>

Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila Bawaslu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari.

Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan.

Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

- 1) pelanggaran pemilu yang bersifat administratif ; *dan*
- 2) pelanggaran yang mengandung unsur pidana.

Bawaslu meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan. Aturan mengenai tata cara pelaporan pelanggaran pemilu diatur dalam ketentuan pasal 247 UU 10/2008 yang diperkuat dalam Peraturan Bawaslu No.05 /2008.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Didik Suprianto Dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011) Hal 14

<sup>32</sup><http://patuhorangindonesia.blogspot.co.id/2014/04/pelanggarankejahatan-pemilu-dan> proses penanganan. Diakses Pada 12 Maret 2018 Pukul 23.20

## 2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilihan.

Mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum<sup>33</sup>. Penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilihan umum, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik atau polisi ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan. Berikut prosedur penyelesaian pelanggaran pidana pemilihan sebagai berikut :

### 1. Proses Penyidikan,

penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas *lex specialist derogat lex generali* maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku.

Mengacu kepada pasal 247 angka (9) UU Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian

---

<sup>33</sup> Lihat pasal 257 UU No. 10 Tahun 2008

dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari.<sup>34</sup>

Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana pemilu. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang. TIM PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU POLRI BARESKRIM: 7 TIM (4 Dalam Negeri + 3 Luar Negeri), POLDA: 5 TIM, POLWIL: 3 TIM, POLRES: 10 TIM.

Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran dari Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap:

- 1) kelengkapan administrasi laporan yang meliputi : keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penanda tangan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; *dan*
- 2) materi/laporan yang antara lain : kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/pelanggaran, waktu laporan.

Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 hari

---

<sup>34</sup> Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu* (Perludem, Jakarta, 2006) Hal.33



tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU).

## **2. Proses Penuntutan.**

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak Kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik.<sup>35</sup>

Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu* (Perludem, Jakarta, 2006) Hal.33

### 3. Proses Persidangan.

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (*speed trial*).<sup>36</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka UU memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan MA (Perma).

PERMA No. 03/2008 menegaskan bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah antara 3 – 5 orang hakim dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu.

---

<sup>36</sup> Didik Suprianto Dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011) Hal 16

Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.<sup>37</sup>

#### **4. Proses Pelaksanaan Putusan.**

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada Penuntut Umum. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa.

---

<sup>37</sup> Didik Suprianto Dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011) Hal 16-17

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Dengan kata lain, pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government of the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Menurut Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya Demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan Demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertinggi.<sup>1</sup>

Maka dari itu Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Demokrasi, maka konsep kedaulatan Negara berada ditangan rakyat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” dalam hal ini rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Prenada Media Group, Jakarta, 2012) h. 64

Salah satu perwujudan bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dilaksanakannya pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat atau memilih Kepala Daerah dari tingkat kabupaten atau kota sampai dengan presiden dan wakil presiden. Pemilu merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga Negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara atau Daerah selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.

Dalam konteks demokrasi lokal yang disebut Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Daerah di Indonesia, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah akan mencerminkan kualitas Demokrasi sesuai dengan asas pemilihan umum. sebab bangsa Indonesia pada umumnya, mendambakan terwujudnya suatu Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, yaitu Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung secara demokratis dan dapat menghasilkan pemimpin Daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu proses dan hasilnya. Pemilihan Kepala Daerah dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila Pemilihan Kepala Daerah itu berlangsung secara Demokratis, aman, tertib, dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari hasilnya, Pemilihan Kepala Daerah itu dapat

menghasilkan pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat dengan adil dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>.

Akan tetapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon ataupun para pendukung bakal calon salah satunya seperti melakukan kampanye hitam (*Black Campaign*). Kampanye hitam dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah yang dapat merusak integritas bakal calon tersebut.

Ada beberapa kriteria yang dapat dikategorikan sebagai kampanye hitam yaitu menghasut, memfitnah, mengadudomba partai politik, perseorangan atau kelompok masyarakat. Kampanye hitam (*Black Campaign*) dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, foto copy artikel, dan lain-lain yang didalamnya berisikan informasi-informasi negatif pihak lawan kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan bakal calon Kepala Daerah.

Salah satu contoh kasus kampanye hitam (*Black Campaign*) terjadi pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di kabupaten Takalar adalah calon Bupati Takalar Burhanuddin yang terkena serangan *Black Campaign* dalam bentuk selebaran yang berisikan tentang kasus penjualan lahan aset Negara yang diduga melibatkan

---

<sup>2</sup> Rozali abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.3.

Bupati Takalar Burhanuddin. Yang ternyata fitnah karena belum diputuskan dalam pengadilan.<sup>3</sup>

Padahal dalam pemilihan Kepala Daerah telah mengatur larangan dalam kampanye. Perbuatan dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. Namun hal ini tetap terjadi dan pelaku pun seolah tidak takut dengan ancaman pidana dan denda yang ada. Dalam islam pun jelas mengatur perbuatan fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik termaksud perbuatan tercela karena menyerang harkat dan martabat orang lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa perbuatan hina dan fitnah tersebut menghalangi perbuatan baik dan jika melampaui batasnya, banyaknya dosa bagi yang melakukannya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan fitnah

<sup>3</sup><http://rakyatsulsel.com/black-campaign-beredar-bur-kampanye-yang-tidak-beretika.html>. diakses pada 16 februari 2018 Pukul 20:27.



yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik sangatlah ditentang oleh Allah SWT.

Kampanye hitam (*Black Campaign*) terjadi dikabupaten takalar terpengaruh berita-berita dari televisi maupun media cetak. Kemudian isu-isu tersebut menyebar dari mulut ke mulut melalui perbincangan baik oleh warga maupun oknum tim sukses dari masing-masing kandidat itu sendiri dalam berbagai situasi, seperti diwarung makan dan warung kopi dan sebagainya.

Perbincangan hangat pun terjadi setelah munculnya pemberitaan yang menyerang memberitakan keterlibatan salah satu kandidat yaitu H.Burhanuddin terlibat dalam kasus penjualan lahan aset Negara, masyarakat semakin penasaran dengan hal ini memicu masyarakat mencari kebenaran atas keterlibatan dalam kasus korupsi yang menimpa bapak H.Burhanuddin selaku Bupati Takalar dan dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan H.Burhanuddin-H.Natsir Ibrahim dalam pemilihan Kepala Daerah 2017.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas secara jelas fenomena tindak pidana dalam kampanye yaitu Black Campaign dalam pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu dalam penulisan berikut ini menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan No 16/Pid.Sus/PN.Tka).**

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaku *Black Campaign* pada pemilihan Kepala Daerah. Mengenai gambaran fokus penelitian penulis mengenai analisis hukum tindak pidana *Black Campaign* pada pemilihan kepala daerah (studi putusan nomor 16/pid.sus/PN.Tka) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku *Black Campaign*.

Adapun deskripsi fokus penulis sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana.<sup>4</sup>
2. Black campaign adalah kegiatan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh lawan politik baik dia seorang calon, partai politik, tim sukses atau para pendukung calon elit politik tersebut terhadap lawan politiknya<sup>5</sup>.
3. Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan kepala daerah secara langsung baik gubernur, wakil gubernur ditingkat provinsi, bupati, wakil bupati maupun walikota dan wakil walikota ditingkat kabupaten dan kota. Yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah secara administratif setempat yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>4</sup>Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Jakarta : CV Armico, 2008 ), h.115.

<sup>5</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik:Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta,: Rajawali Pers, 2009), h.319.

### **C. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *Black campaign* pada pemilihan Kepala Daerah dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP?

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah penulis melakukan penelusuran-penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, maka diperoleh beberapa literatur sebagai acuan dasar antara lain.

1. Ubaedillah dan Abdul Rozak dalam bukunya *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* dalam buku ini membahas Cita-cita proklamasi yang tersurat pada Pembukaan UUD 1945 menjadi rujukan kemana arah masa depan bangsa Indonesia.

2. Prof.H. Rozali Abdullah,S.H dalam bukunya *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih berkualitas* dalam buku ini membahas beberapa kebijakan baru guna menyempurnakan sistem pemilu legislatif, terkait pencalonan,kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu.
3. Topo Santoso, S.H,M.H dalam bukunya *Tindak Pidana Pemilu* dalam buku ini membahas semua tindak pidana yang berkaitan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam UU Pemilu.
4. Leo Agustino, dalam bukunya *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal* dalam buku ini membahas pemilihan Kepala Daerah langsung yang merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak 2005. Pilkada merupakan pemilihan langsung pemimpin esekutif.
5. Gousyali zaidam dalam bukunya *Dari Bilik Suara Ke Masa Depan Indonesia* yang dalam bukunya membahas beberapa gagasan dan pendapat mengenai pertarungan politik menjelang pemilihan langsung.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Black campaign pada pemilihan Kepala Daerah dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka.

2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHP.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana Black Campaign pada Pemilihan Kepala Daerah.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan acuan atau masukan bagi seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan para pembaca mengenai tindak pidana pada masa kampanye pemilihan kepala daerah.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *Law in book* ) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

## **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kabupaten Takalar yaitu pada Pengadilan Negeri Takalar.

### **B. Metode Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Yuridis (*Statute approach*)**

Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

#### **2. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus yaitu berarti penelitian yang menekankan untuk dilakukannya telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi dilapangan yaitu menganalisis suatu kasus putusan pengadilan yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Takalar

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.**



2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu :

1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung.<sup>1</sup>
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### ***E. Metode Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu :

1. Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

---

<sup>1</sup>Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### ***A. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana Black Campaign pada pemilihan Kepala Daerah dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka***

Untuk memperjelas dan memperkuat penulisan serta mendukung penulisan hukum ini maka penulis menyajikan kasus Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Takalar yaitu perkara nomor 16/Pid.sus/2017/PN.Tka. Tentang Tindak Pidana Black Campaign. Berdasarkan Penelitian yang telah lakukan di Pengadilan Negeri Takalar maka untuk lebih jelasnya penulis sajikan data atau kasus Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah.

#### **1. Identitas Terdakwa**

Nama lengkap	: H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD
Tempat Lahir	: Cikoang
Umur/ Tgl Lahir	: 58 Tahun/ 31 Desember 1958
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Cikoang, Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sma (Tamat)

## 2. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik. Sesuai dengan jadwal/zona kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 nomor urut dua yakni H.Syamsari Kitta, S.PT,MM dan H.Ahmad Dg.Se're, S.Sos berdasarkan keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 89/SK-PILKADA/KPU-025.433274/2017 tanggal 26 Januari 2017 Tentang Revisi Jadwal/zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye dan Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, Terdakwa selaku pihak yang di undang dan pendukung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor Urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa Daerah di depan masyarakat yang hadir, diantara lain yaitu: “kaanne toayya sanna rantasa’na, na punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukangi, nabalukangi laikang, nabalukangi Galesong, punna Erokki Kamma Laikang Ribalukanggi, Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi kasus Transmigrasi Laikang, Tena Tanijakkala’na”. Artinya “ karena ini yang tua kotor sekali, kalau kita tidak bersatu

mendukung berua baji akan dijual galesong, kalau kita mau seperti laikang yang dijual, dia menjual laikang, dia akan menjual galesong, kalau kita mau seperti laikang yang dijual, sekarang ini pak bur sudah A1 kasus Transmigrasi laikang, pasti akan ditangkap”. Perkataan Terdakwa SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO tersebut dimaksudkan oleh terdakwa ditujukan kepada H.BURHANUDDIN B, SE.Ak,M.Si, yang terdakwa ketahui dan sadari bahwa perkataan terdakwa mengenai saksi H.BURHANUDDIN B, SE, Ak, M.Si sebagaimana disebutkan diatas tersebut, diperoleh atau didapat terdakwa dari orang lain antara lain dari Kepala Desa Laikang atau dari media Online, dan bukan dari aparat Penegak Hukum yang Berwenang. Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut, saksi H.BURHANUDDIN B, SE,Ak,M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 merasa keberatan dan merasa nama baiknya tercemar, tidak baik dimata masyarakat dan merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H.BURHANUDDIN B, SE,Ak,M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira jam 14.00 waktu Indonesia Bagian Timur (WITA) atau setidaknya masih dalam bulan januari tahun 2017, bertempat di lingkungan kampung tala, kelurahan bontolebang, kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri takalar, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, calon

Wakil Walikota dan/atau Partai Politik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sesuai dengan zona/jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati takalar tahun 2017 nomor urut dua yakni, H.SYAMSARI KITTA,S.PT,MM DAN H.ACHMAD DG SE'RE S.Sos berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum, kabupaten Takalar Nomor : 89/SK-Pilkada/KPU-025.43327/2017 tanggal 26 januari 2017 tentang revisi jadwal/zona kampanye, rapat umum, iklan kampanye, dan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati takalar tahun 2017 nomor urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa daerah didepan masyarakat yang hadir, antara lain yaitu “kaanne toayya sanna rantasa'na”, yang artinya karena ini yang tua kotor sekali.
- Perkataan dari terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk ditunjukkan kepada H.BURHANUDDIN B, SE.Msi sebagai calon bupati Takalar Tahun 2017 sebagaimana surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Takalar 54/SK-PILKADA/KPU 025.433274/2016 Tanggal 24 oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati takalar tahun 2017.
- Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut, saksi H.BURHANUDDIN B SE,M.Si sebagai calon Bupati Takalar Tahun 2017 merasa keberatan dan merasa nama baiknya tercemar dan tidak baik dimata masyarakat.

Perbuatan terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMAD pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira jam 14.00 waktu Indonesia Bagian Timur (WITA) atau setidaknya masih dalam bulan januari tahun 2017, bertempat di lingkungan kampung tala, kelurahan bontolebang, kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya masih termaksud dalam daerah hukum pengadilan negeri takalar, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu, domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat,, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sesuai dengan zona/jadwal kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati takalar tahun 2017 nomor urut dua yakni, H.SYAMSARI KITTA,S.PT,MM DAN H.ACHMAD DG SE'RE S.Sos berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum, kabupaten Takalar Nomor :

89/SK-Pilkada/KPU-025.43327/2017 tanggal 26 januari 2017 tentang revisi jadwal/zona kampanye, rapat umum, iklan kampanye, dan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati takalar tahun 2017 nomor urut dua, melakukan orasi dengan menggunakan pengeras suara kemudian mengeluarkan perkataan dengan menggunakan bahasa daerah didepan masyarakat yang hadir, antara lain yaitu:

- Na punna tena kibersatu andukungi berua baji andukungi berua baji, nabalukanggi galesong, punna erokki kamma laikang ‘ yang artinya “kalau kita tidak bersatu mendukung berua baji akan dijual galesong, kalau kita mau seperti laikang yang dijual.
- “Nabalukanggi laikang, nabalukanggi galesong, punna erokki kamma laikang ribalukang” yang artinya “ dia menjual laikang, dia akan menjual galesong, kalau kita mau seperti laikang yang dijual”.
- “Anne kamma anne pak bur A1 mi kasus Transmigrasi Laikang” yang artinya “sekarang ini pak bur sudah A1 kasus transmigrasi laikang”.
- “tena tanijakkalana” yang artinya “ pasti akan ditangkap”
- Perkataan dari terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk ditunjukkan kepada H.BURHANUDDIN B, SE.Msi yang terdakwa ketahui dan sadari bahwa perkataan terdakwa mengenai saksi H.BURHANUDDIN B, SE.M.Si sebagaimana disebutkan diatas tersebut,

diperoleh atau didapat terdakwa dari orang lain antara lain Kepala Desa Laikang, atau dari media Online , dan bukan dari aparat penegak hukum yang berwenang.

Akibat dari perkataan dari terdakwa tersebut, saksi H.BURHANUDDIN B SE,M.Si sebagai calon Bupati Takalar Tahun 2017 merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat tidak memilih saksi H.BURHANUDDIN B SE,M.Si sebagai calon Bupati Takalar Tahun 2017.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No.Reg.Perk:PDM-01/TKLAR/Euh.1/01/2017 tertanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa H.SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO BIN AHMAD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PEMILIHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 187 ayat (2) junto Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO BIN AHMAD dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Tuang Baso. Terlampir dalam berkas
- d. Menetapkan agar terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

### **5. Amar Putusan**

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan Terdakwa H.SYAMSUDDI AIDID KRG BASO BIN AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada H.SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H.Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

#### **6. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan***

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kabupaten Takalar sedang berlangsung kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017 ;
2. Bahwa benar terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar dalam Pemilukada Kabupaten Takalar yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yaitu H. BURHANUDDIN. B, SE,Ak, M.Si dan H.M. NATSIR IBRAHIM, SE, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu H. SYAMSARI KITTA, S.Pt. MM dan H. ACHMAD DG. SE'RE, S.Sos, berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 54/SK PILKADA/KPU.025.433274/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 ;

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 16.00 wita di lapangan Lingkungan Kampung Tala, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berlangsung kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai dengan jadwal/zona kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 89/SK-PILKADA/KPU- 025.433274/2017 tanggal 26 Januari 2017 Tentang Revisi Jadwal/Zona Kampanye, Rapat Umum, Iklan Kampanye & Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 ;
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hadir pada kampanye tersebut sebagai orator Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 di depan masyarakat, termasuk di antaranya yang hadir yaitu saksi NASRUL AZIZ Bin AZIZ ;
5. Bahwa benar terdakwa telah melakukan orasi di muka umum di depan masyarakat dengan perkataan atau kata-kata antara lain :

- *“Kaanne Toayya Sanna Rantasa’na”*, yang artinya : karena ini yang tua kotor sekali ;

- *“Na Punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang”* yang artinya “Kalau kita tidak

bersatu mendukung barua baji akan dijual Galesong, Kalau kita mau seperti laikang yang dijual” ;

- “*Nabalikangi Laikang, Nabalukangi Galesong*”, “*Punna Erokki Kamma Laikang Ribalukang*”, yang artinya, Dia menjual Laikang, Dia akan menjual Galesong, Kalau kita mau seperti Laikang yang dijual ;

- “*Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi Laikang*”, yang artinya, sekarang ini, ini Pak Bur sudah A1 Kasus Transmigrasi Laikang ;

- “*Tena Tanijakkala’na*”, yang artinya, pasti akan ditangkap ;

6. Bahwa benar atas perkataan dari terdakwa tersebut dimaksudkan oleh terdakwa untuk ditujukan kepada H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 ;
7. Bahwa benar orasi kampanye Terdakwa tersebut ada yang mengunggahnya di media sosial Facebook dengan akun Akun atas nama IRFAN ISMAIL ;
8. Bahwa benar salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu saksi DHIRGA ADIPATI Bin ARIFIN, yang mengetahui adanya video orasi terdakwa di Facebook, pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 21.00 WITA melaporkan adanya video orasi terdakwa yang diunggah di Facebook yang mengandung penghinaan, langsung melaporkan kepada Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, dan atas petunjuk dari Tim Kuasa Hukum
9. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, saksi DHIRGA ADIPATI Bin ARIFIN melaporkannya Panwaslu 9. Bahwa benar perkataan terdakwa yaitu “Kaanne

Toayya Sanna Rantasa'na", yang artinya : karena ini yang tua kotor sekali, korban saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut 1 merasa keberatan dan merasa nama baiknya tercemar dan tidak baik di mata masyarakat serta kalimat terdakwa yang mengatakan : *"Na Punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang"* yang artinya "Kalau kita tidak bersatu mendukung barua baji akan dijual Galesong, kalau kita mau seperti laikang yang dijual; *"Nabalikangi Laikang, Nabalukangi Galesong"*, *"Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang"*, yang artinya, Dia menjual Laikang, Dia akan menjual Galesong, kalau kita mau seperti Laikang yang dijual; *"Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi Laikang"*, yang artinya, sekarang ini, ini Pak Bur sudah A1 Kasus Transmigrasi Laikang; *"Tena Tanijakkala'na"*, yang artinya, pasti akan ditangkap; korban saksi H.BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut 1 merasa keberatan karena mengakibatkan masyarakat dapat tidak ; memilih saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017, karena korban saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si tidak pernah merasa menjadi tersangka namun hanya pernah dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ;

10. Bahwa benar perkataan terdakwa mengenai saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagaimana disebutkan di atas tersebut, diperoleh atau didapat

terdakwa dari Kepala Desa Laikang, atau dari Running Text TVOne, atau dari orang lain dan bukan dari aparat Penegak Hukum yang berwenang ;

11. Bahwa benar terdakwa pada saat mengeluarkan kata-kata tersebut dalam kegiatan kampanye, karena terdakwa merasa sakit hati kepada korban saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si sebagai Calon Bupati Takalar Tahun 2017, dan karena terdakwa merasa tanahnya diduga telah dijual oleh korban saksi H. BURHANUDDIN. B, SE, Ak, M.Si pada saat menjadi Bupati Takalar periode 2012 s/d 2017 ;
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Sdri Dra.NURSI AH TUPA, M.Hum Peneliti Bahasa pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :
  - “*Ka Anne Toayya Sanna Rantasana*” terjemahannya “karena ini yang tua kotor sekali”.Adapun maksud dari pernyataan tersebut yaitu bermakna konotasi maksudnya menghina seseorang yang bernama Pak Bur kotor karena dia jual Laikang atau mungkin ada kelakuan yang lain, dan pernyataan ini termasuk dalam kategori menghina seseorang
  - “*Na Punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang*” terjemahannya “Kalau kita tidak bersatu mendukung barua baji akan dijual Galesong, Kalau kita mau seperti laikang yang dijual”, adapun maksud dari pernyataan tersebut yaitu menghasut/memprovokator orang untuk memilih paslon tertentu karena jika tidak Galesong akan dijual seperti Laikang yang dijual. Kalimat ini mengandung unsur menghasut

- *“Anne Kamma Anne Pak Bur Sudah A1 Mi Kasus Transmigrasi Laikang”* terjemahannya “Sekarang ini, ini Pak Bur Sudah A1 Kasus Transmigrasi Laikang”, kalimat ini mengandung unsur fitnah
- *“Tena Tanijakkala’na”* terjemahannya “pasti akan ditangkap”, adapaun artinya bahwa pembicara sudah memastikan bahwa Pak Bur menjual Laikang dan terlibat dalam kasus Transmigrasi, mengandung unsur fitnah.

13. Bahwa benar orang yang dimaksudkan dalam perkataan terdakwa tersebut adalah saksi BURHANUDDIN calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 ;
14. Bahwa benar terdakwa sengaja mengatakan kata-kata tersebut supaya masyarakat tidak memilih saksi BURHANUDDIN sebagai Calon Bupati Takalar Nomor Urut 1 ;
15. Bahwa benar terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, dan terdakwa mengatakan kata-kata tersebut karena terdakwa merasa sebagai korban dari perbuatan terdakwa dan terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi BURHANUDDIN ;
16. Bahwa benar terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, beralasan karena terdakwa mendapat informasi dari Running Text TVOne dan dari Kepala Desa Laikang Sdr. SILA LAIDI dan dari Saudara terdakwa dan dari Konferensi Pers Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, namun terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikannya ;
17. Bahwa benar terdakwa terdakwa secara sadar telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dan mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang menurut hukum ;

- Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu : **Kesatu** : Melanggar Pasal 187 ayat (2) *juncto* Pasal 69 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dan **Kedua** : Melanggar Pasal 187 ayat (2) *juncto* Pasal 69 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun



*2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.*

Karena dakwaan berbentuk kumulatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal Pasal 187 ayat (2) *juncto* Pasal 69 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Yang unsur-unsurnya, yaitu :

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan di dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan dan selama persidangan. H.SYAMSUDDIN AIDID BIN AHMAD dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandeljik Vermoges) atau sakit jiwa (Zeekelijke string der Verstandeljik Vermoges) sebagai mana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relativ yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi hukum.

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H bahwa yang dimaksud dengan Opzet yaitu “willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki (willen) perbuatan itu harus menginsyafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan mengkhendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat dan bertindak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka “unsur dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calob Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik”.

Bahwa larangan dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 69 Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pasal 69 huruf b Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan : “dalam kampanye dilarang: b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

Menimbang, bahwa dari sudut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa “menghina” berarti merendahkan, memandang rendah, (hina, tidak penting) atau memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang”.

Menimbang, bahwa menghina dalam pasal 69 huruf b Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijelaskan

secara detail dalam Undang-Undang tersebut sehingga pengertiannya mengacu kepada pengertian penghinaan dalam KUHP yaitu dalam pasal 310 KUHP yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menghina seseorang , agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik, didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum, maka unsur “melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik”. Ini telah terpenuhi menurut hukum.

bahwa Selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan di dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan dan selama persidangan. H.SYAMSUDDIN AIDID BIN AHMAD dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijk Vermoges) atau sakit jiwa (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermoges) sebagai mana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi hukum.

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H bahwa yang dimaksud dengan Opzet yaitu “willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki (willen) perbuatan itu harus menginsyafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan mengkhendaki perbuatan yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat dan bertindak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka “unsur dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Bahwa larangan dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 69 Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa pasal 69 huruf b Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan : “dalam kampanye dilarang: b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.



Menimbang, bahwa dari sudut bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa “menghina” berarti merendahkan, memandang rendah, (hina, tidak penting) atau memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang”.

Menimbang, bahwa menghina dalam pasal 69 huruf b Undang-Undang 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak dijelaskan secara detail dalam Undang-Undang tersebut sehingga pengertiannya mengacu kepada pengertian penghinaan dalam KUHP yaitu dalam pasal 310 KUHP yang dimaksud dengan “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang itu biasanya malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui banyak orang)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menghina seseorang , agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik, didalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum, maka unsur “melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil

Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota dan/atau Partai Politik”. Ini telah terpenuhi menurut hukum.

bahwa Selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut:

## 2. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya yang menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan di dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan dan selama persidangan. H.SYAMSUDDIN AIDID BIN AHMAD dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

kurang sempurna akalnya (Verstandelijk Vermoges) atau sakit jiwa (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermoges) sebagai mana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi hukum.

#### 4. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan biasa disebut dengan istilah Opzet atau Dolus adalah sesuatu yang bersifat psikis dari perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara konkrit oleh panca indra karena menyangkut niat dan kehendak seseorang yang bersifat psikis tadi, dengan demikian sengaja atau Opzet atau Dolus erat sekali hubungannya dengan perbuatan si pelaku tindak pidana.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan Opzet atau Dolus tersebut, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H bahwa yang dimaksud dengan Opzet yaitu “willen en weten” (dikehendaki dan diketahui) atau sengaja adalah “seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus mengkhendaki (willen) perbuatan itu harus menginsyafi atau mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu”, jadi pelaku harus mengerti dan mengkhendaki perbuatan

yang dilakukan serta akibatnya, dengan demikian sengaja atau kesengajaan dapat dirumuskan sebagai melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh sesuatu keinginan untuk berbuat dan bertindak.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka “unsur dengan sengaja” ini telah terpenuhi menurut hukum.

5. Unsur Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh **unsur dakwaan kesatu**: Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang., dan **Unsur dakwaan Kedua** : Melanggar Pasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa menyangkut sistem penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yaitu pidana denda, oleh karena terlalu ringan, kurang layak dan adil serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, dan berdasarkan SEMA NO.1 Tahun 2000 yang mana “ Mahkamah Agung, mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye “ yang diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu dan kedua.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa (*vide pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*) :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis
- Antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Istri terdakwa dalam keadaan sakit stroke dan selalu dicuci darah ke Makassar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkup penjatuhan pidana dengan menengok sosio-yuridis agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Ulah mengingat eksistensi hukum itu tidak berada dalam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa merupakan prinsip dalam menjatuhkan pidana harus sebanding dengan bobot dengan kesalahan tidak sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Ulah hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa.
2. Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera

pada diri terdakwa yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan penyitaan yaitu berupa :

- 1 (satu) Keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H. Syamsuddin Aidid Tuang Baso, maka Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula



dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa H.SYAMSUDDI AIDID KRG BASO BIN AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “ dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada H.SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H.Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

**B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.**

Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundangan-undangan yang dibahas oleh penulis, maka terlebih dahulu harus jeli menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat tumpang tindih dan dianggap

tidak efektif serta mencari kekeliruan yang terdapat didalamnya. Maka dari itu penulis melakukan analisis dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara nomor *16/Pid.Sus/2017/PN.Tka*, sebagai berikut:

Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini:

#### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “dengan sengaja menghina seseorang dan menghasut, memfitnah perseorangan atau kelompok masyarakat sebagaimana pelaksanaan larangan kampanye”.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada H.SYAMSUDDIN AIDIN KRG BASO BIN AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) keping CD-R Plus GT-PRO Multi Speed 56X berwarna putih beserta kotak CD warna hitam yang berisikan cuplikan orasi kampanye Chalik Suang dan H.Syamsuddin Aidid Krg Baso Bin Ahmad.
- Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

### C. Analisis Penulis

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan di tuntutan untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang yang mengatur dan menjadi dasar dari semua peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. Seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas maksimum dan minimum pemidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.

Menurut Penulis didasarkan gambaran kasus Tindak Pidana Pemilihan di atas dengan putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka. Mencermati kembali penerapan ketentuan unsur-unsur tindak pidana pemilihan dalam UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada tidak sama dengan kebijakan perumusan dalam KUHP karena ternyata rumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subyek, seperti peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu, Pejabat negara, Pemerintah, dan Peradilan, serta lain sebagainya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, rumusannya cenderung menggunakan sistem kumulatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda yang rentan perbedaan sanksi minimal dan sanksi maksimal cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan ciri-ciri menggunakan kata-kata “dan” dalam sanksi pidananya. Dalam hal ini, berdasarkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis* maka dalam dakwaan Tindak Pidana Pemilihan, ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah

hanya ketentuan di dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan yang dilakukan Penuntut Umum dengan konsisten menggunakan UU No. 10 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada sebagai dakwaan Tindak Pidana Pemilihan sudah tepat.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa menggunakan dakwaan kumulatif sehingga jaksa harus membuktikan dakwaan yang dijatuhkan tersebut yaitu **pertama** : Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan **Kedua** Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014. Dan oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum tersebut. Maka selanjutnya yaitu tugas Hakim untuk melakukan pertimbangan hukum yang akan mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Takalar dan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Takalar, yaitu DR. Amirul Faqih Hamzah S.H, M.H bahwa putusan Majelis Hakim harus dapat memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum menjatuhkan putusan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian tersebut. Pelaksanaan sanksi pidana penjara 3 bulan itu sudah memberikan rasa keadilan menurut majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman Pidana penjara karena tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian karena telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap Terdakwa, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa. Kalau berbicara keadilan terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut sudah adil bagi Terdakwa terlepas dari memenuhi keadilan publik mengingat substansi keadilan itu berbeda-beda. Mengenai efek jera untuk pelaku tindak pidana pemilu tidak ada yang dapat menjamin karena pemilu dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 5 tahunnya. Intinya ada pada kesadaran terhadap pelaku

tersebut, hanya kesadaran diri sendiri yang bisa memberikan teguran untuk tidak mengulangi perbuatannya di pemilu yang akan datang.<sup>1</sup>

Pemahaman tersebut berbeda dengan analisis Penulis. Menurut hemat Penulis salah satu tujuan dari pembedaan adalah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana berbanding terbalik dengan komentar salah satu hakim di Pengadilan Negeri Takalar. Berdasarkan putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka, terdakwa melanggar pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menurut Penulis, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa H.SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO BIN AHMAD yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terdapat kekeliruan hal ini disebabkan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan pihak korban, mengingat bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi dua unsur pidana yang menggunakan dakwaan kumulatif yaitu **pertama**: Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara salah satu hakim PN Takalar, bpk DR.Amirul Faqih Hamzah, SH, M.H

Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan **Kedua** Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014, dimana dalam ketentuan yang mengatur tentang dakwaan kumulatif, terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, maka hanya di jatuhkan satu pidana yang maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga. Sedangkan jika membandingkan dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (bulan), tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang dakwaan kumulatif yang telah disebutkan diatas karena maksimal dari Pidana yang di kenakan adalah 18 (delapan belas) bulan penjara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana black campaign yang berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka telah sesuai karena telah berdasarkan Pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan Pertimbangan Sosiologis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan.
2. Putusan hakim dalam perkara Nomor 16/PidSus/2017/PN.Tka yang dianalisis oleh penulis, tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 dan KUHAP, hal ini dikarenakan putusan yang di jatuhkan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dianggap terlalu ringan karena dakwaan JPU yaitu menggunakan dakwaan kumulatif, yang jika dakwaan tersebut terbukti maka penjatuhan hukuman yang diberikan yaitu hukuman Maksimal ditambah dengan sepertiga, sedangkan dalam Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yaitu pidana penjara maksimumnya yaitu 18 (delapan belas) bulan.



### **B. Implikasi**

1. Dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan Kepala Daerah melalui sistem peradilan pidana, banyak kasus yang dilaporkan sebagai suatu tindak pidana ternyata setelah melalui suatu proses akhirnya berguguran di tengah jalan dan hanya sebagian saja yang diperiksa di Pengadilan. Majelis Hakim pengadilan Negeri Takalar sudah tepat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan Kepala Daerah, yang dimaksudkan agar efek penjeratan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai salah satu penegak hukum, Hakim hendaknya benar-benar memperhatikan setiap pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana pemilihan Kepala Daerah, karena dalam kasus tersebut pasti mendapat sorotan yang lebih dari masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.
3. Penulis mengharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jera agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada prakteknya, pidana penjara yang diterapkan yang ada hanyalah hukuman 3 bulan penjara yang menurut penulis itu masih belum bisa dikatakan memberikan efek jera bagi pelaku

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi* (Prenada Media Group, Jakarta, 2012) h. 64

Rozali abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.3.

Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Jakarta : CV Armico, 2008 ), h.115.

Hafied Cangara, *Komunikasi Politik:Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta,: Rajawali Pers, 2009), h.319.

Romi Librayanto, *Ilmu Negara Suatu Pengantar* (Refleksi,Makassar, 2012) Hal. 212

Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Gama media, Yogyakarta, 1999) h.221

Ramlan Surbakti, *Dalam titik Triwulan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), h.10.

Taufiqurrahman Syahuri, *Anatomi Putusan MK RI Tentang Pemilukada, Seminar Putusan MK Pengujian UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, h.6.

Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.28.

I.B.G Suryatmaja M, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung* .(Jakarta: Artikel dalam Rountable Discussion, Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah, 2003), h.25.

Sastrawidjaja Sofjan, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana* (Jakarta: CV Armico, 2008), h.1.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193.

Modul tim, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008), h.14.

Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 21.

Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 2007), h.72.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*(Jakarta: AskaraBaru, 1999), h.80.

Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System* (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), h.48.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 61.

Perihi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Semarang: Sinar Grafika,2005) , h. 7.

Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 175.

Tim Modul, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Pusdiklat, 2008), h.38.

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.1.

Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h.48.

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Cetakan I, Jakarta: CV. Rajawali, 1987), h.148.

Venus, *Komunikasi Dalam Keoemimpinan*,(IndoPress, Bandung 2006) h.47

Yanti Setianti, , *Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak* (Alumni, Bandung, 2008) hlm 4

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Gramedia Pustaka Utama,Indonesia,2008) hal.152

Muzakkir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*,(Dictum,Jakarta,2004) hal. 17

#### B. Sumber Website

[http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye\\_politik](http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politik), diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 011 wit

Al Jami Ii Ahkam Al-Qur'an

Petikan Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004, h.71

<http://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018 pukul 23.12 wit



Nomor : B- 333 /SH.O1/PP.00.9/03/2018  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Seminar Hasil

Samata Gowa, Maret 2018

**Kepada Yth :**

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )
2. Istiqamah, S.H, M.H (Sekertaris)
3. Dr. Jumadi, M.H (Penguji I)
4. Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag (Penguji II)
5. Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H (Pembimbing I)
6. Irfan, S.Ag, M.Ag (Pembimbing II)
7. Pelaksana.

Di -

Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Arifin  
NIM : 10500113201  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/ Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Maret 2018  
Waktu : 09.00 - 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016-199003-1-003

MAKASSAR



Nomor : B-142 /SH.01/PP.00.9/03/2018  
Sifat : Penting  
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah/Skripsi

Samata Gowa, Maret 2018

**Kepada Yth :**

1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua )
2. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (Sekertaris)
3. Dr. Jumadi, S.H, M.H (Penguji I)
4. Dr. Muh. Sabri Ar, M.Ag (Penguji II)
5. Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H (Pembimbing I)
6. Irfan, S.Ag, M.Ag (Pembimbing II)
7. Pelaksana  
di

Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Arlifin  
NIM : 10500113201  
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang kepada Bapak/Ibu, Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018  
Buka Sidang : 08.30 Wita  
Waktu : Pukul 11.00- 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;



Nomor : SI.1/PP.00.9/571/2018  
Lamp : 1 (satu) exemplar  
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 06 Februari 2018

Kepada

**Yth. Kepala Pengadilan Negeri Takalar**

Di-  
Kabupaten Takalar

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Muh. Arlifin  
N I M : 10500113201  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Judul Skripsi yaitu :

**"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Black Campaign* Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar"**  
(Studi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2017/PN.Tka)

Dengan dosen pembimbing:

1. Ashabul Kahpi., S.Ag., M.H
2. Irfan., S.Ag., M.Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar mulai tanggal 7 Februari s/d 28 Februari 2018.

Demikian harapan kami dan terima kasih.  
Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



**Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.**  
Nip. 19621016 199003 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

ALAUDDIN Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sundauminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : Tahun 2018

**T E N T A N G**

**PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI TAHUN 2018**

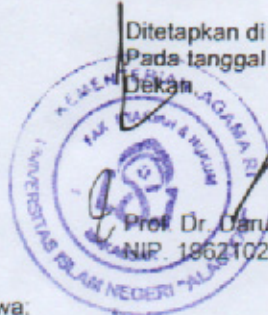
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** :
- Surat Permohonan :
  - Nama : Muh. Alrifin
  - N I M : 10500113201
  - Jurusan : Ilmu Hukum
  - Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2018
  - Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
  - Judul : "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Kampanye di Kab. Takalar (Studi Kasus PN Takalar)"
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal Penelitian/Skripsi;
  - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian/Skripsi
  - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
  - Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
  - Penguji I : Dr. Jumadi, S.H., M.H.
  - Penguji II : Dr. Moh. Sabri AR, M.Ag.
  - Pelaksana : 1. Herawati, S.H.
  - 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Dekan

Samata Gowa  
Januari 2018



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag  
NIP. 19621020 199903 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;





PENGADILAN NEGERI TAKALAR  
Jalan Jend Sudirman No. 11, Kab. Takalar  
Tlp/Fax. (0418) 21018 (0418) 21009  
Website: pn-takalar.go.id  
Email : pn.takalar@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 01/SK/HK/2018/PN Tka

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : H.MANGUNG,SH  
NIP : 19590823 198303 1 007

Pangkat / Gol. Ruang : III/d (Penata Tk.I)  
Jabatan : Panitera.

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MUH.ARLIFIN  
NIP/NIM : 10500113201  
Program Studi : Hukum

Telah selesai melaksanakan survey dan analisa data di Pengadilan Negeri Takalar, dengan judul "Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana Bleck compaign Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar ( Studi Putuan Nomor 16 / Pid.Sus/2017/PN.Tka)" yang dilaksanakan dari tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Takalar, 19 Februari 2018

Panitera

H.MANGUNG,SH.-  
NIP. 19590823 198303 1 007



## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul,” **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Black Campaign Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Takalar (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN. Takalar)**” bernama lengkap Muh Arlifin, Nim 10500113201, Anak Terakhir dari enam bersaudara dari pasangan H.akbar Nadjia dan Hj.Lismawaty, lahir pada tanggal 23 Agustus 1996 di Kota Makassar. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SDN Inpres Takalar Kota pada tahun 2001-2007 lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Takalar pada tahun 2007-2010 setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Takalar pada tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dinyatakan lulus dalam jalur undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) DI Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum pidana hingga tahun 2018.

ALAUDDIN  
MAKASSAR